

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai di Indonesia, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa sanksi pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak lagi efektif dalam menegakkan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai serta mengevaluasi kebijakan penerapannya dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah regulasi dalam Undang-Undang Cukai serta implementasinya oleh aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi cukai telah mengakomodasi asas ultimum remedium, dalam praktiknya masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sanksi pidana tetap digunakan meskipun pelanggaran dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, sehingga berpotensi menyebabkan kriminalisasi berlebihan. Selain itu, ketidakseimbangan dalam penerapan sanksi juga berdampak pada kepastian hukum bagi pelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan optimalisasi mekanisme administratif, penguatan pengawasan terhadap penegakan hukum cukai, serta evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa prinsip ultimum remedium diterapkan secara konsisten dan proporsional. Dengan demikian, penegakan hukum cukai dapat berjalan lebih efektif, adil, dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan negara serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Kata Kunci: *Ultimum remedium, tindak pidana cukai, kebijakan penegakan hukum.*

ABSTRACT

This research discusses the application of the ultimum remedium principle in excise crimes in Indonesia, namely the principle which emphasizes that criminal sanctions should be the last resort after administrative and civil efforts are no longer effective in enforcing the law. The aim of this research is to analyze legal regulations related to the principle of ultimum remedium in excise crimes and evaluate policies for implementing it in practice. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach, which examines the regulations in the Excise Law and their implementation by law enforcement officials. The research results show that although excise regulations have accommodated the ultimum remedium principle, in practice there are still inconsistencies in its application. Several cases show that criminal sanctions are still used even though violations can be resolved through administrative mechanisms, thus potentially leading to over-criminalization. Apart from that, the imbalance in the application of sanctions also has an impact on legal certainty for perpetrators and society. Therefore, this research recommends optimizing administrative mechanisms, strengthening supervision of excise law enforcement, and evaluating policies to ensure that the principle of ultimum remedium is applied consistently and proportionally. In this way, excise law enforcement can be more effective, fair, and maintain a balance between the interests of the state and the protection of people's rights.

Keywords: *Ultimum remedium, excise crime, law enforcement policy.*